



Analisis Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengawasan APBD di Kota Malang

Vike Agestian Frastami¹, Kirani Felita June², Eva Hany Fanida³, Revienda Anita Fitrie⁴

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi : 25040674151@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674142@mhs.unesa.ac.id², evafanida@unesa.ac.id³, reviendafitrie@unesa.ac.id⁴

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 13 Mei 2026

ABSTRACT

Transparency and accountability are fundamental principles in achieving good governance, particularly in the management of local finances. This study aims to analyze the implementation of transparency and accountability in the oversight of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Malang City. This study employs a qualitative descriptive approach using a literature review method. Data were obtained from scientific journals, government regulations, official reports, and public documents related to local financial management and APBD oversight. The research analysis refers to transparency and accountability indicators according to Krina, which include information disclosure, ease of access to information, complaint mechanisms, information dissemination, and performance accountability. The results of the study indicate that the Malang City Government has implemented the principles of transparency and accountability through the provision of APBD documents, performance accountability reports, and the use of a digital-based information system. Nevertheless, a number of challenges remain, such as limited public access to technical financial information, suboptimal public complaint mechanisms, and the limited effectiveness of public communication. In terms of accountability, its implementation has been reflected through the preparation of the LAKIP and performance-based budgeting; however, some indicators remain administrative in nature and are not yet fully results-oriented. Therefore, strengthening participatory governance, improving communication with the public, and optimizing digital-based financial oversight are crucial for enhancing the quality of local financial management.

Keywords: *Transparency, Accountability, Oversight of the Regional Budget, Regional Finance, Good Governance*

ABSTRAK

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode tinjauan pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, laporan resmi, dan dokumen publik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan APBD. Analisis penelitian mengacu pada indikator transparansi dan akuntabilitas menurut Krina, yang meliputi pengungkapan informasi, kemudahan akses terhadap informasi, mekanisme pengaduan, penyebaran informasi, dan akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian

memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan dokumen APBD, laporan pertanggungjawaban kinerja, dan penggunaan sistem informasi berbasis digital. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan teknis, mekanisme pengaduan masyarakat yang belum optimal, serta efektivitas komunikasi publik yang masih terbatas. Dalam hal akuntabilitas, implementasinya telah tercermin melalui penyusunan LAKIP dan penganggaran berbasis kinerja, namun, beberapa indikator masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola yang partisipatif, peningkatan komunikasi kepada publik, serta optimalisasi pengawasan keuangan berbasis digital menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan APBD, Keuangan Daerah, Good Governance.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan penting sebagai instrumen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, efisien, dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ruang lingkup keuangan negara meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang bernilai ekonomi, termasuk seluruh kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan memiliki fungsi strategis karena menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD mempunyai peran penting sebagai sarana perencanaan, pengawasan, dan penilaian pembangunan daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat menyalurkan anggaran ke berbagai sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi merupakan aspek penting dalam memberikan akses terbuka kepada masyarakat terhadap informasi mengenai proses penyusunan anggaran dan penggunaan keuangan daerah. Sementara itu, akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan anggaran kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat (Sriwijayanti, 2018).

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga merupakan bagian dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Menurut (Mudhofar, 2022) tata kelola yang baik dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan yang terbuka, partisipatif, efektif, dan akuntabel. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan daerah, sehingga meningkatkan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran. Di sisi lain, akuntabilitas berfungsi sebagai indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kegiatan berdasarkan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip efisiensi, ekonomis, efektivitas, transparansi, dan pertanggungjawaban, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap APBD menjadi aspek penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan keuangan daerah.

Sebagai daerah otonom, Kota Malang juga menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran daerahnya, terutama terkait efektivitas pengawasan, akses terhadap informasi publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan anggaran. Penelitian (Jayanti, Sjamsuddin, & Wachid, 2014) bahwa reformasi pengelolaan keuangan daerah di Kota Malang telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis. Studi lain yang dilakukan oleh (Dhuri Mbipi, 2024) juga menjelaskan bahwa transparansi informasi publik dalam tata kelola keuangan daerah di Kota Malang masih belum optimal karena informasi yang tersedia masih bersifat teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat umum.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah. (Aulia, Hasibuan, Waruwu, & Nurhaliza, 2024) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas memainkan kontribusi besar dalam meningkatkan mutu tata kelola keuangan pemerintah daerah. (Ratnasari & Rahmawati, 2024) menjelaskan bahwa transparansi informasi publik meningkatkan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran pemerintah. Di sisi lain, (Nikmatul Fajri, Djumali, & Hartono, 2019) menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penerapan prinsip transparansi berpengaruh terhadap pertanggungjawaban tata kelola keuangan daerah. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada dampak transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah secara umum, sedangkan penelitian mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan anggaran daerah di Kota Malang masih relatif terbatas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dengan berfokus pada penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang, menggunakan indikator transparansi dan akuntabilitas sebagaimana didefinisikan oleh (Krina, 2003). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengawasan APBD Kota Malang serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dalam bentuk tinjauan pustaka. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk mendapat

pemahaman secara mendalam terkait penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara menyeluruh melalui pengkajian mendalam terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka dengan menelaah berbagai referensi yang sesuai dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan terdiri atas artikel jurnal ilmiah, laporan pemerintah, regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, dokumen APBD Kota Malang, laporan LAKIP, serta berbagai publikasi akademik lain yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan daerah. Literatur yang dipakai diprioritaskan berasal dari jurnal nasional terakreditasi dan publikasi ilmiah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir guna menjaga relevansi dan kebaruan data penelitian.

Dalam penelitian ini, tahapan analisis data dilakukan melalui proses penyaringan data, pemaparan data, dan perumusan kesimpulan. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan indikator transparansi dan akuntabilitas menurut (Krina, 2003), meliputi keterbukaan informasi, kemudahan memperoleh informasi, mekanisme pengaduan, kerja sama dengan media, kelengkapan informasi, serta pertanggungjawaban kinerja. Analisis dilakukan dengan membandingkan teori dan hasil penelitian terdahulu dengan kondisi implementasi pengawasan APBD di Kota Malang sehingga diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan APBD Kota Malang telah mengalami perkembangan yang cukup baik melalui penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis regulasi dan digitalisasi informasi publik. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek aksesibilitas informasi, efektivitas komunikasi publik, serta kualitas pengawasan yang bersifat partisipatif.

Transparansi Pengawasan APBD di Kota Malang

Transparansi menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik karena berkaitan dengan keterbukaan informasi publik terhadap proses pengelolaan keuangan daerah. Menurut (Krina, 2003), transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu penyediaan informasi yang jelas mengenai prosedur, biaya, dan tanggung jawab, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan masyarakat, serta kerja sama dengan media massa dan lembaga nonpemerintah dalam meningkatkan arus informasi. Prinsip transparansi menjadi penting dalam pengawasan APBD karena dapat meningkatkan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.

Pada indikator penyediaan informasi, Pemerintah Kota Malang telah menunjukkan upaya keterbukaan melalui publikasi dokumen APBD, perubahan

APBD, serta laporan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui laman resmi pemerintah daerah. Dokumen tersebut memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara sistematis sehingga masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan anggaran pemerintah daerah. Penyediaan informasi tersebut menunjukkan adanya implementasi prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil tersebut selaras dengan penelitian (Hendriadi, Sahri, & Basuki, 2017) yang menjelaskan bahwa transparansi anggaran menjadi elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Selain penyediaan informasi, transparansi juga berkaitan dengan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik. Pemerintah Kota Malang telah menyediakan berbagai dokumen pengelolaan keuangan melalui media digital dan situs resmi pemerintah daerah. Meskipun demikian, temuan penelitian mengindikasikan bahwa aksesibilitas informasi masih belum optimal karena sebagian besar dokumen bersifat teknis dan administratif sehingga sulit dipahami masyarakat umum. Kondisi tersebut menyebabkan keterbukaan yang tersedia lebih mengarah pada formal administratif dan belum sepenuhnya komunikatif. Hasil penelitian ini memperkuat temuan (Dhuri Mbipi, 2024) yang menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik pada tata kelola keuangan daerah Kota Malang masih mengalami hambatan pada aspek pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan daerah.

Selanjutnya, pada indikator mekanisme pengaduan, Pemerintah Kota Malang telah memiliki sistem pengawasan internal melalui inspektorat daerah serta mekanisme pelaporan dalam sistem pemerintahan daerah. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih akuntabel. Akan tetapi, mekanisme pengaduan publik terkait pengawasan APBD belum terintegrasi secara optimal dengan sistem informasi publik sehingga partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aduan masih terbatas. Padahal, keberadaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dapat meningkatkan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Dalam aspek kolaborasi dengan media massa dan institusi nonpemerintah, Pemerintah Kota Malang telah melibatkan masyarakat pada proses penyusunan perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Partisipasi tersebut menunjukkan adanya upaya membangun keterlibatan publik dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Namun, publikasi informasi APBD melalui media massa dan platform komunikasi publik masih belum maksimal sehingga informasi anggaran belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Menurut (Sudrajat, 2021), kolaborasi antara pemerintah, media massa, dan masyarakat sipil merupakan faktor penting dalam memperkuat transparansi publik dan meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan temuan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi transparansi pengawasan APBD di Kota Malang telah berjalan cukup baik dari sisi penyediaan dokumen dan sistem informasi publik. Namun demikian, transparansi masih perlu diperkuat melalui penyederhanaan informasi keuangan

daerah, peningkatan aksesibilitas publik, penguatan mekanisme pengaduan, serta optimalisasi komunikasi publik berbasis digital agar pengawasan APBD dapat berlangsung lebih partisipatif dan inklusif.

Akuntabilitas Pengawasan APBD di Kota Malang

Akuntabilitas dalam pengelolaan APBD berhubungan dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran serta pencapaian program kepada masyarakat. Menurut (Krina, 2003), indikator akuntabilitas meliputi kelengkapan dan akurasi informasi, konsistensi target operasional, penyebarluasan informasi kepada publik, akses masyarakat terhadap informasi kebijakan, serta mekanisme monitoring dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Akuntabilitas tidak hanya menekankan pada pelaporan administratif, tetapi juga pada kualitas hasil program yang dibiayai oleh APBD.

Berdasarkan indikator akuntabilitas menurut (Krina, 2003), aspek pertama yang dapat dianalisis adalah kelengkapan dan akurasi informasi. Pemerintah Kota Malang telah menyusun berbagai laporan pertanggungjawaban seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan APBD. Laporan tersebut memuat capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan laporan secara sistematis menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Esni, Made, & Wulandari, 2019) yang menjelaskan bahwa penerapan akuntabilitas dan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah di Kota Malang.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi dalam laporan pertanggungjawaban masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait penggunaan indikator kinerja yang cenderung berorientasi pada output administratif dan belum sepenuhnya menggambarkan outcome program terhadap kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan evaluasi kinerja pemerintah daerah belum sepenuhnya berorientasi pada hasil pembangunan yang substantif.

Indikator kedua berkaitan dengan konsistensi dan kelayakan target operasional. Pemerintah Kota Malang pada dasarnya telah mengintegrasikan program prioritas pembangunan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara perencanaan pembangunan dengan alokasi anggaran tahunan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara target program dengan kapasitas anggaran yang tersedia sehingga beberapa program belum dapat mencapai hasil secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran masih memerlukan penguatan agar target pembangunan lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada indikator penyebarluasan informasi, pemerintah daerah telah melakukan publikasi dokumen keuangan dan laporan kinerja melalui website resmi pemerintah daerah. Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Akan tetapi, efektivitas

penyebarluasan informasi masih terbatas karena informasi yang tersedia masih bersifat teknis dan kurang komunikatif. Akibatnya, tidak seluruh masyarakat dapat memahami substansi laporan keuangan daerah secara menyeluruh.

Selanjutnya, pada indikator akses publik terhadap informasi, masyarakat sudah mempunyai kesempatan untuk mendapat informasi terkait APBD dengan melalui portal resmi pemerintah daerah dan layanan keterbukaan informasi publik. Namun demikian, temuan penelitian mengindikasikan bahwa akses tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat keterbatasan literasi masyarakat, kurangnya interaktivitas informasi publik, serta minimnya pemanfaatan media digital yang lebih partisipatif. Menurut (Coryanata, 2016), hubungan yang kuat ditunjukkan antara partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, penerapan akuntabilitas dalam pengawasan APBD Kota Malang telah menunjukkan perkembangan yang positif melalui penyusunan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang relatif terstruktur. Akan tetapi, penguatan kualitas informasi, evaluasi berbasis hasil, peningkatan akses publik, serta pengembangan sistem pengawasan partisipatif masih diperlukan agar akuntabilitas tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga memiliki nilai substantif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan APBD Kota Malang secara umum telah mengarah pada implementasi prinsip good governance. Pemerintah Kota Malang telah menyediakan berbagai dokumen pengelolaan keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Transparansi telah tercermin melalui publikasi dokumen APBD, laporan keuangan daerah, dan sistem informasi berbasis digital, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan kinerja seperti LAKIP serta penerapan penganggaran berbasis kinerja. Meskipun demikian, implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan APBD masih menghadapi beberapa kendala. Transparansi informasi publik masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya komunikatif karena informasi keuangan daerah cenderung teknis dan sulit dipahami masyarakat. Selain itu, mekanisme pengaduan publik serta penyebarluasan informasi melalui media massa dan platform digital belum berjalan optimal. Dari sisi akuntabilitas, kualitas indikator kinerja masih lebih berorientasi pada capaian administratif dibandingkan hasil nyata program terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang perlu memperkuat sistem pengawasan APBD melalui pengembangan keterbukaan informasi yang lebih partisipatif, peningkatan kualitas komunikasi publik, penguatan mekanisme pengaduan masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta evaluasi kinerja yang berorientasi pada outcome perlu dilakukan agar

pengelolaan APBD tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aulia, Y., Hasibuan, D. S. B., Waruwu, H., & Nurhaliza, S. (2024). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG. *Journal of Student Research*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i2.2809>
- Coryanata, I. (2016). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(2), 110–125. Retrieved from <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/678>
- Dhuri Mbipi, S. (2024). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang). *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 130–139. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.581>
- Esni, M. T., Made, A., & Wulandari, R. (2019). ANALISIS PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA MALANG MARIA. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(2), 1–11. <https://doi.org/10.21067/jrma.v7i2.4254>
- Hendriadi, Sahri, & Basuki, P. (2017). Applying Transparency Principle on the Planning and Budgeting in Mataram. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(2), 124–146. <https://doi.org/10.17977/um002v9i22017p122>
- Jayanti, I. P., Sjamsuddin, S., & Wachid, A. (2014). REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS (Studi Pada Pemerintah Kota Malang). 2(2), 300–305.
- Krina, L. L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. In *Sekretariat Good Public Governance BPPN*.
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21–30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>
- Nikmatul Fajri, R., Djumali, & Hartono, S. (2019). ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN, SISTEM PENGAWASAN MELEKAT DAN PRINSIP TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) (STUDI EMPIRIS PADA DPRD KABUPATEN REMBANG). *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, XVI(1), 64–83.
- Ratnasari, B., & Rahmawati, M. I. (2024). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA. *JIAKu: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, (72), 374–392. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i4.7162>
- Sriwijayanti, H. (2018). ANALISIS PENGARUH TRANSPARANSI,

AKUNTABILITAS DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN APBD (*Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang*). 7(1), 89–101.

Sudrajat, A. R. (2021). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PUBLIK: BAGAIMANA PENGARUH TERHADAP KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 395–402. Retrieved from <https://repository.unsap.ac.id/index.php/fisipunsap/article/view/236>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kualitatif Dan R & D*. In *Bandung:Alfabeta*. (Cetakan Ke). Bandung, Indonesia: ALFABETA,CV. Retrieved from https://digi-lib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf